

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan pada prinsip negara hukum, di mana semua peristiwa dan aktivitas di Indonesia diatur oleh hukum atau konstitusi. Negara hukum Indonesia terbentuk melalui pengaruh beragam ideologi, falsafah bangsa, dan kondisi yang memengaruhi suatu negara. Sejarah Indonesia memiliki peran signifikan dalam pembentukan landasan hukum negara ini. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1). Di tingkat global, terdapat berbagai jenis bentuk negara, seperti negara kesatuan, negara serikat, dan negara konfederasi.¹

Bersamaan dengan evolusi waktu, fenomena globalisasi, dan kemajuan teknologi, berbagai pengaruh eksternal mudah masuk dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masa depan masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sebagai bagian dari bangsa dan negara. Saat ini, dinamika global cenderung menuju arah paham liberalisme.² Liberalisme berakar pada penghormatan terhadap kebebasan individu, yang bertentangan dan berkonflik dengan nilai-nilai yang dianut dalam Ideologi Pancasila.

Dampak dari globalisasi melibatkan pergeseran peran negara bangsa, yang cenderung didominasi oleh nilai-nilai individualistik dari dunia barat. Keberhasilan peradaban individualistik di Barat mendorong mereka untuk menerapkan konsep ini secara aktif ke negara-negara berkembang dengan menggunakan kekuatan ekonomi yang dimiliki. Situasi ini membuka potensi bagi ideologi kapitalis liberal untuk mendominasi dunia melalui pengaruh ekonomi. Sebagai negara dengan keberagaman ras, bahasa, adat istiadat, budaya, dan hukum, pertanyaan apakah Indonesia, dengan ideologi Pancasila, dapat tetap eksis dan bertahan di tengah dominasi ideologi liberal adalah sebuah tantangan signifikan. Hal ini akan menjadi ujian

¹ SH Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, "KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA," *Pengertian Konstitusi*, 2020, 2009–15.

² Muhaimin, *Pemikiran Pendidikan Islam: kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Operasionalnya* (Bandung: Trigenta Raya, 1993).

yang besar bagi pemerintah dan masyarakat, terutama generasi muda sebagai penerus dan pembela bangsa.³

Ideologi memiliki peranan yang sangat penting untuk suatu bangsa dan negara dalam menentukan arah serta tujuan hidup. Masyarakat yang hidup dalam suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ideologi bangsanya, karena terdapat hubungan intrinsik antara keduanya. Ideologi sendiri berasal dari sistem filosofi dan merupakan hasil penyempurnaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip teoritis. Oleh karena itu, Suatu bangsa dan negara tidak mungkin menerapkan sistem ideologis yang tidak didasarkan pada filosofi kehidupan atau falsafah negaranya.⁴ Sebagai negara kesatuan, Indonesia menjadikan Pancasila sebagai landasan filsafah hidup dalam kehidupan bersama. Hal ini mencakup upaya memasukkan dan mendidik warga negara dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta menjaga keutuhan ideologi tersebut agar tetap relevan seiring dengan perkembangan zaman.

Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, dan aturan yang mengatur cara hidup sesuai dengan keberagaman cita-cita dan niat setiap individu. Ir. Soekarno menyatukan beragam elemen tersebut dalam konsep Pancasila. Konsep ini pertama kali diungkapkan oleh Soekarno dalam sidang pertama Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada tanggal 1 Juni 1945.⁵ Meskipun Ir. Soekarno tidak pernah mengklaim dirinya sebagai pendiri Pancasila, melainkan sebagai penggali Pancasila, tidak mengherankan bahwa Pancasila muncul dari prinsip-prinsip yang menjadi panduan hidup bagi bangsa Indonesia. Ir. Soekarno mempelajari nilai-nilai ini dan mengakui mereka sebagai Pancasila.

Pancasila kini menjadi landasan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan merupakan dasar utama untuk

³ Nurul Fadilah, "Tantangan Dan Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0," *Journal of Digital Education, Communication, and Arts (Deca)* 2, no. 02 (2019): 66–78, <https://doi.org/10.30871/deca.v2i02.1546>.

⁴ Surajiyo, "Keunggulan Dan Ketangguhan Ideologi Pancasila," *Universitas Indraprasta PGRI* 4, no. 58 (2020): 146–54.

⁵ Redyanto Sidi et al., "Sejarah Pancasila Sebagai Salah Satu Awal Sejarah Hukum Di Indonesia," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 12 (2021): 494–500, <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.166>.

semua hukum yang berlaku di negara ini.⁶ Pancasila, sebagai aspirasi negara Kesatuan Republik Indonesia, atau fondasi ideologi, telah melalui perjalanan panjang sebelum dikenal dengan lima sila, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.⁷

Pancasila, sebagai standar dasar negara, harus berfungsi sebagai dasar untuk membentuk peraturan yang terkait dengan relasi sosial, kekuasaan politik, situasi sosial-ekonomi, tradisi, perkembangan internasional, dan kondisi geografis. Pemikiran ini sangat masuk akal karena Pancasila berasal dari pengalaman hidup bangsa Indonesia sejak zaman dahulu, terutama setelah mereka menghuni kepulauan Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila dapat dianggap sebagai bagian integral dari sejarah awal hukum Indonesia dan sebagai sumber hukum nasional.⁸

Generasi muda Indonesia pada masa sekarang menghadapi tantangan identitas dan nasionalisme yang signifikan. Negara dan bangsa ini mengalami krisis dalam menginternalisasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, moral, dan persatuan. Posisi strategis pemuda dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila, menjadi kunci untuk mencapai kemerdekaan bangsa.⁹

Meningkatnya tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia memberikan celah bagi perkembangan paham radikalisme. Untuk mencegah merebaknya ideologi radikal dan liberal, perlu dilibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, termasuk upaya khusus dalam melibatkan anak-anak agar terhindar dari pengaruh paham radikal. Penguatan pemahaman agama dengan fokus pada nilai-nilai yang benar dianggap sebagai langkah penting, di samping peran agama dalam melawan radikalisme. Pemerintah juga memiliki peran vital dalam memperkuat pemahaman terhadap

⁶ Muhammad Fadli, "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat," *Jurnal legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 49–58.

⁷ Saifudin, "Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU," *Hukum* 16 (2009): 97.

⁸ Sidi et al., "Sejarah Pancasila Sebagai Salah Satu Awal Sejarah Hukum Di Indonesia."

⁹ H. B Adz-Dzakey, *Prophetic Leadership* (Yogyakarta: Al Manar, 2009).

Pancasila dan melaksanakan revolusi mental sebagai upaya kontra terhadap perkembangan yang merugikan di Indonesia.

Isu keberlanjutan Ideologi Pancasila saat ini menjadi tanggung jawab rakyat Indonesia. Terlihat dari perdebatan mengenai pembentukan negara berdasarkan agama hingga pembebasan dalam berbagai sektor kehidupan. Dampak dari permasalahan ideologi sangat signifikan, karena jika ideologi terganggu, seluruh aspek kehidupan masyarakat akan terpengaruh. Pancasila, sebagai ideologi, memegang peran kunci dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Solusi untuk mengatasi isu tersebut melibatkan upaya mendiagnosa kondisi keberlanjutan Ideologi Pancasila di Indonesia.

Dalam rangka membina ideologi Pancasila, pemerintah Kabupaten Demak, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) terus berusaha melakukan pendidikan dan penyuluhan. Badan KESBANGPOL Kabupaten Demak merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi prioritas di Kabupaten tersebut, sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 83 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi. Badan KESBANGPOL memiliki tugas utama adalah memberikan dukungan kepada Bupati Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga ini berperan dalam merumuskan langkah-langkah kebijakan di sektor kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, termasuk organisasi kemasyarakatan. Dalam sektor kesatuan bangsa, badan ini memiliki tanggung jawab kepada kepala badan untuk menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan, mengevaluasi, dan melaporkan aktivitas di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, serta kewaspadaan dini dan penanganan konflik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai lembaga pemerintah, memiliki peran krusial dalam menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia, terutama di wilayah Kabupaten Demak melalui wewenang otoritas yang dimilikinya. Dari latar belakang diatas, maka dalam skripsi ini penulis mengambil judul **Upaya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Penguatan Ideologi Pancasila Terhadap Masyarakat Di Kabupaten Demak.**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memahami langkah-langkah yang diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan kekuatan Ideologi Pancasila di kalangan masyarakat Kabupaten Demak. Pendekatan kualitatif digunakan dengan melibatkan interaksi langsung, wawancara, serta merujuk pada sumber-sumber referensi seperti buku dan jurnal untuk mendukung validitas penelitian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan, penulis menyusun pokok permasalahan mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memperkuat ideologi Pancasila di Kabupaten Demak yaitu:

1. Apa Isu-isu Strategis Ideologi Pancasila di Kabupaten Demak ?
2. Bagaimana Upaya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (KESBANGPOL) dalam menguatkan Ideologi Pancasila di Kabupaten Demak ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari perincian masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan mencapai beberapa tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk memahami apa Isu-isu Strategis Ideologis Pancasila di Kabupaten Demak
2. Untuk memahami bagaimana Upaya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (KESBANGPOL) dalam Menguatkan Ideologi Pancasila di Kabupaten Demak

E. Manfaat Penelitian

Dengan pelaksanaan penelitian ini, diharapkan hasil penulisan dapat menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai langkah-langkah yang ditempuh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memperkuat ideologi Pancasila di Kabupaten Demak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi isu-isu terkait ideologi Pancasila dan memberikan pemahaman mengenai upaya pembinaan ideologi Pancasila di wilayah Kabupaten Demak. Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini melibatkan:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diinginkan agar penelitian ini dapat berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan di bidang pemikiran

politik Islam dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait realitas yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu meluaskan perspektif mahasiswa, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran KESBANGPOL dalam memperkuat Ideologi Pancasila terhadap masyarakat di Kabupaten Demak.
- c. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi peneliti lainnya sebagai studi banding dan tambahan literatur dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks Pemikiran Politik Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti
 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berharga berdasarkan pemahaman yang diperoleh selama masa kuliah, serta dapat menjadi dasar untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. Terutama dalam memahami upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memperkuat ideologi Pancasila di Kabupaten Demak.
- b. Bagi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
 Diinginkan agar penelitian ini dapat mengevaluasi dan pertimbangan penyusunan program dalam melihat bagaimana sebenarnya ideologi Pancasila dan isu-isu yang ada di Kabupaten Demak.
- c. Bagi Masyarakat
 Harapannya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang meluas dan menjadi panduan bagi semua pihak yang terlibat, terutama dalam konteks politik terkait dengan penguatan ideologi Pancasila, khususnya untuk masyarakat umum.

F. Sistematika Penulisan

Struktur penyusunan proposal skripsi yang penulis pilih dalam merancang laporan penelitian deskriptif terdiri dari lima bab yang saling terkait untuk mencapai tujuan penelitian,

sehingga penulis dapat menjaga keterkaitan dengan tujuan penelitian. Sistematisasi penyusunan tersebut mencakup:

1. Bagian Awal

Dibagaian penyusunan proposal skripsi ini diawali dari Sampul, Pengesahan, Pernyataan keaslian skripsi, Abstrak, Moto, Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab Lati, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel.

2. Bagian Tengah

Bagian ini terdiri dari tiga bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun ketiga bab tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan diuraikan mengenai dasar masalah yang dipilih oleh peneliti, yang disusun secara umum. Bagian ini mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Dalam bab ini, terdapat penjelasan mengenai teori-teori dan kajian teori terkait dengan upaya KESBANGPOL dalam menguatkan ideologi Pancasila di Kabupaten Demak. Bagian ini juga mencakup referensi dari penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai pendukung data, seperti judul skripsi untuk dibandingkan dengan penelitian yang relevan. Selain itu, dalam bab ini disajikan kerangka berpikir yang menjadi Dasar konseptual dari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, diuraikan mengenai metode penelitian yang diterapkan oleh penulis. Penjelasan melibatkan jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, sumber data, pengujian validitas data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis memberikan gambaran umum mengenai penelitian, deskripsi hasil penelitian, serta analisis data terkait Upaya KESBANGPOL dalam Ideologi Pancasila di Kabupaten Demak. Dengan demikian, Hasil Riset ini diinginkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif terkait dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini, terdapat rangkuman berkenaan dengan temuan yang telah dijelaskan dalam penelitian, analisis tentang keterbatasan dari penelitian, dan petunjuk untuk melanjutkan penelitian ini ke masa mendatang. Kesimpulan dan penutup menjadi fokus dalam bagian ini.

3. Bagian Akhir

Bagian ini mencakup daftar Pustaka yang memuat referensi-referensi yang relevan dan digunakan penulis untuk mendukung penelitian. Sementara itu, juga terdapat lampiran-lampiran yang melengkapi data pada penelitian.